

INDEKS KEMAHALAN KONSTRUKSI

PROVINSI SULAWESI SELATAN 2023



INDEKS KEMAHALAN KONSTRUKSI

PROVINSI SULAWESI SELATAN 2023

<https://sulsel.bps.go.id>



Indeks Kemahalan Konstruksi Provinsi Sulawesi Selatan 2023

No. Publikasi : 73000.2402
Katalog Publikasi : 7102025.73
Ukuran Buku : 21 cm x 29,7 cm
Jumlah Halaman : xiv+33 halaman

Naskah :
Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan

Penyunting :
Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan

Gambar kulit :
Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan

Diterbitkan Oleh :
© Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan

Dicetak Oleh :
Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan

Tim Penyusun

Pengarah
Aryanto

Penyunting
Wa Ode Al' Asaria

Penulis
Amaliyah

Desain dan Tata Letak
Amaliyah

<https://sulsel.bps.go.id>

KATA PENGANTAR

Publikasi “**Indeks Kemahalan Konstruksi Provinsi Sulawesi Selatan 2023** merupakan merupakan publikasi tahunan hasil dari pelaksanaan Survei Harga Kemahalan Konstruksi (SHKK) yang dilakukan secara triwulanan di seluruh Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan. Data yang dikumpulkan dalam survei tersebut mencakup harga berbagai barang dan jasa konstruksi.

Data yang disajikan dalam publikasi ini meliputi data IKK Kabupaten/Kota se-Provinsi Sulawesi Selatan. Publikasi ini diharapkan dapat memberi gambaran perkembangan data IKK Kabupaten/Kota se- Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019-2023.

Ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penerbitan publikasi ini, terutama kepada perusahaan atau responden yang telah membantu kelancaran Survei Harga Kemahalan Konstruksi sehingga publikasi ini bisa diterbitkan. Semoga publikasi ini bermanfaat dan dapat memenuhi sebagian harapan pengguna data. Berbagai saran dan masukan sangat kami harapkan demi edisi yang lebih baik di masa yang akan datang.

Makassar, Desember 2023

Kepala Badan Pusat Statistik
Provinsi Sulawesi Selatan,



Aryanto

DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	v
Daftar Isi.....	vii
Daftar Tabel.....	ix
Daftar Gambar.....	xi
Daftar Lampiran.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Tujuan.....	2
1.3 Cakupan.....	2
1.4 Konsep Definisi.....	2
BAB II METODOLOGI	
2.1 Indeks Kemahalan Konstruksi.....	5
2.2 Paket Komoditas IKK.....	6
2.3 Diagram Timbang IKK.....	8
2.4 Dana Alokasi Umum.....	8
2.5 Formula Penghitungan Indeks Kemahalan Konstruksi.....	8
BAB III ULASAN RINGKAS	
3.1 Gambaran Umum Provinsi Sulawesi Selatan.....	11
3.2 Kondisi Transportasi Provinsi Sulawesi Selatan	13
3.3 Dana Alokasi Umum (DAU) Provinsi Sulawesi Selatan.....	13
3.4 Indeks Kemahalan Konstruksi Provinsi Sulawesi Selatan.....	14
3.5 Indeks Kemahalan Konstruksi Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan.....	17
Lampiran.....	19

DAFTAR TABEL

Tabel		Hal
1.	Luas Wilayah Kabupaten/Kota Sulawesi Selatan	12
2.	Alokasi DAU Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021	14
3.	Indeks Kemahalan Konstruksi Kabupaten / Kota di Provinsi Sulawesi Selatan 2022	17

<https://sulsel.bps.go.id>

DAFTAR GAMBAR

Gambar		Hal
1	Peta Tematik Indeks Kemahalan Konstruksi Menurut Provinsi di Indonesia Tahun 2023	15
2	Nilai dan Ranking Indeks Kemahalan Konstruksi Provinsi Sulawesi Selatan, 2019 - 2023	16
3	Peta Tematik Indeks Kemahalan Konstruksi Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023	18

<https://sulsel.bps.go.id>

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran		Hal
1.	Nilai IKK Provinsi di Indonesia Tahun 2019 (Kota Semarang = 100).....	19
2.	Nilai IKK Provinsi di Indonesia Tahun 2020 (Kota Semarang =100).....	21
3.	Nilai IKK Provinsi di Indonesia Tahun 2021 (Kota Semarang = 100).....	23
4.	Nilai IKK Provinsi di Indonesia Tahun 2022 (Kota Makassar = 100).....	25
5.	Nilai IKK Provinsi di Indonesia Tahun 2023 (Kota Makassar = 100).....	27
6.	Nilai IKK Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019.....	29
7.	Nilai IKK Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020.....	30
8.	Nilai IKK Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021.....	31
9.	Nilai IKK Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022.....	32
10.	Nilai IKK Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023.....	33

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam memperbaiki kesejahteraan masyarakat di daerah, pemerintah daerah diarahkan untuk mendorong percepatan dan pemerataan pembangunan di wilayahnya masing-masing sesuai dengan kebijakan otonomi daerah (Otonomi Daerah) pada tahun 2000. Pemerintah daerah dapat mempunyai hak dan kewenangan yang luas untuk menggunakan sumber-sumber keuangan yang dimilikinya sesuai dengan kebutuhan masing-masing daerah. Hal ini berlandaskan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Tujuan lain dari kebijakan Otonomi Daerah adalah pemerataan kemampuan keuangan antar daerah sehingga ketimpangan antar daerah dapat teratasi. Pemerintah daerah terutama yang masih tertinggal diharapkan mampu mengelola keuangan daerah dan memanfaatkan sumber daya alam yang terdapat di daerahnya sehingga Pendapatan Asli Daerah (PAD) meningkat. Kebijakan Otonomi Daerah yang dikeluarkan pemerintah sejak tanggal 1 Januari 2001 dilandasi oleh Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah.

Pembangunan terdesentralisasi yang telah diterapkan selama ini membutuhkan suatu indikator guna perimbangan keuangan daerah otonom. Salah satu dana perimbangan tersebut ialah Dana Alokasi Umum (DAU). DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi sesuai dengan UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah pasal 1 ayat 21. DAU merupakan instrumen transfer yang dimaksudkan untuk meminimumkan ketimpangan fiskal antar daerah, sekaligus memeratakan kemampuan antar daerah.

Menurut Undang-Undang No.23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, salah satu dana perimbangan yang dibagikan oleh pemerintah pusat untuk pemerintah daerah berupa Dana Alokasi Umum (DAU) yang pengalokasiannya menekankan pada aspek pemerataan dan keadilan yang selaras dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan di masing-masing daerah.

Terkait dengan hal tersebut, salah satu variabel yang digunakan dalam formulasi penghitungan DAU adalah Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) disamping variabel jumlah penduduk, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), luas wilayah, dan angka Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per Kapita.

Melakukan penghitungan IKK sejak tahun 2002 untuk keperluan penghitungan DAU 2003 yang kemudian dilanjutkan hingga sekarang. Data IKK tersebut ditujukan untuk melihat tingkat perbandingan harga barang/jasa konstruksi antarwilayah dibandingkan dengan harga barang/jasa konstruksi suatu kota acuan. Menurut World Bank, Indonesia sebagai negara kepulauan dengan kondisi geografis yang relatif beragam dan jumlah penduduk terbesar keempat di dunia, infrastruktur diduga memegang peranan dalam penentuan harga konstruksi di Indonesia. Semakin sulit letak geografis suatu daerah maka diduga semakin tinggi pula tingkat harga konstruksi di daerah tersebut.

1.2 Tujuan

Penyajian Publikasi Indeks Kemahalan Konstruksi Provinsi Sulawesi Selatan 2023 dimaksudkan untuk memberikan informasi terkait data tingkat kemahalan konstruksi seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan dan perbandingan tingkat kemahalan konstruksi Provinsi Sulawesi Selatan dengan provinsi lainnya. Publikasi Indeks Kemahalan Konstruksi Provinsi Sulawesi Selatan, diharapkan dapat memberikan informasi kepada para pengguna data, baik dari instansi pemerintah maupun swasta. Data tersebut sekaligus juga dapat digunakan sebagai masukan bagi perencanaan di Sulawesi Selatan untuk masa mendatang.

1.3 Cakupan

Data yang disajikan dalam publikasi ini merupakan hasil pengolahan dan penghitungan hasil Survei Harga Kemahalan Konstruksi yang dilakukan secara triwulanan dari seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2018-2022.

1.4 Konsep Definisi

Beberapa konsep dan definisi umum yang digunakan dalam proses pengumpulan data dan penghitungan Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) antara lain: konsep mengenai harga barang konstruksi termasuk harga sewa alat berat, pedagang besar, pedagang campuran, kegiatan konstruksi, tingkat kemahalan konstruksi, diagram timbang, dan indeks kemahalan konstruksi.

- a. **Indeks Kemahalan Konstruksi** didefinisikan sebagai: Suatu indeks yang menggambarkan tingkat perbandingan harga barang/jasa konstruksi antar wilayah dibandingkan dengan harga barang/jasa konstruksi suatu kota acuan.
- b. **Bahan bangunan atau konstruksi** didefinisikan sebagai: Bahan bangunan atau konstruksi didefinisikan sebagai material yang digunakan dalam pembentukan komponen bangunan dan ditempatkan pada bagian suatu bangunan atau konstruksi yang merupakan satu kesatuan dari bangunan tersebut.
- c. **Kegiatan Konstruksi** didefinisikan sebagai: Suatu kegiatan meliputi perencanaan, persiapan, pembuatan, pembongkaran, dan perbaikan bangunan yang hasil akhirnya berupa bangunan atau konstruksi yang menyatu dengan lahan tempat kedudukannya baik digunakan sebagai tempat tinggal atau sarana kegiatan lainnya. Kegiatan konstruksi yang dicatat dalam penghitungan IKK hanya kegiatan investasi (pembangunan baru, bukan renovasi yang tidak menambah nilai aset). Hasil kegiatan konstruksi antara lain: gedung, jalan, jembatan, terowongan, bangunan air dan drainase, bangunan sanitasi, landasan pesawat terbang, dermaga, bangunan pembangkit listrik, transmisi, serta distribusi dan bangunan jaringan komunikasi
- d. **Sewa Alat Berat** didefinisikan sebagai harga yang terjadi ketika seseorang/organisasi/institusi menyewa alat berat yang digunakan untuk kegiatan konstruksi dalam periode tertentu. Satuan/unit yang digunakan dalam harga sewa ini merupakan sewa selama 1 bulan atau 200 jam. Harga sewa hanya biaya sewa alat, tidak termasuk biaya mobilisasi alat dari penyewa ke lokasi proyek, dan juga tidak termasuk biaya jasa operator. Umur alat berat yang disewakan juga memiliki syarat batas umur maksimal 8 tahun.
- e. **Upah** didefinisikan sebagai Uang dan sebagainya yang dibayarkan sebagai pembalas jasa atau sebagai pembayar tenaga yang sudah dikeluarkan untuk mengerjakan sesuatu. Dalam kegiatan konstruksi, upah jasa konstruksi meliputi upah mandor, kepala tukang, tukang, pembantu tukang. Satuan/unit yang digunakan dalam upah jasa ini adalah satu orang/hari
- f. **Tingkat Kemahalan Konstruksi (TKK)** didefinisikan sebagai: Cerminan dari suatu nilai bangunan/konstruksi yang akan dibandingkan antar daerah, yaitu besarnya biaya yang dibutuhkan untuk membangun 1 (satu) unit bangunan per satuan ukuran luas di

suatu kabupaten/kota atau provinsi yang diukur melalui sekelompok barang dan jasa yang digunakan.

- g. Paket komoditas didefinisikan sebagai:** Sejumlah barang terpilih yang digunakan sebagai komponen penghitungan IKK. Komoditas/ jenis barang tersebut dipilih karena memenuhi asas representativeness dan comparability yaitu andil yang cukup besar dan data harganya dapat dipantau dan mempunyai tingkat keterbandingan antar kabupaten/kota. Paket komoditas disebut juga sebagai kualitas nasional.
- h. Kualitas provinsi didefinisikan sebagai:** Kualitas yang dominan disuatu provinsi tetapi tidak dominan bila ditinjau secara nasional. Kualitas provinsi digunakan sebagai dasar konversi kedalam kualitas nasional untuk kualitas nasional yang memang tidak terdapat di provinsi tersebut.
- i. Diagram Timbang didefinisikan sebagai:** Bobot yang digunakan dalam penghitungan IKK terdiri dari diagram timbang IKK menurut kelompok jenis bangunan (3 kelompok) dan diagram timbang Umum. Diagram timbang kelompok jenis bangunan adalah bobot setiap jenis barang dan jasa dalam memperoleh nilai TKK masing-masing kelompok jenis bangunan. Diagram timbang umum adalah bobot setiap jenis bangunan dalam memperoleh IKK umum setelah diperoleh IKK masing-masing kelompok jenis bangunan.
- j. Harga perdagangan besar (HPB) didefinisikan sebagai:** Harga transaksi yang terjadi antara pedagang besar pertama sebagai penjual dengan pedagang besar berikutnya sebagai pembeli secara party/grosir di pasar pertama atas suatu barang.
- k. HPB bahan bangunan/konstruksi didefinisikan sebagai:** Harga berbagai jenis bahan bangunan yang digunakan dalam kegiatan konstruksi dalam jumlah besar (party) yang merupakan hasil transaksi antara pedagang besar/distributor/ supplier bahan bangunan/konstruksi dengan pengguna bahan bangunan tersebut.
- l. Pedagang besar (PB) didefinisikan sebagai:** Pedagang/distributor yang menjual bahan bangunan/konstruksi secara party/grosir atau dalam jumlah besar.
- m. Pedagang campuran didefinisikan sebagai:** Pedagang yang dapat menjual barang dagangannya dalam jumlah besar maupun eceran. Grosir atau jumlah besar yang dimaksud adalah bukan eceran. Batasan ini relatif, mengingat sulit menentukan besarnya, baik kuantitas maupun nilai dari suatu komoditas. Hal ini sangat tergantung dari karakteristik komoditasnya sendiri

BAB II

METODOLOGI

2.1 Indeks Kemahalan Konstruksi

Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) merupakan angka indeks yang menunjukkan perbandingan harga bahan bangunan atau jasa konstruksi antar lokasi yang berbeda pada periode yang sama dibandingkan dengan suatu kota acuan. Lebih lanjut, IKK merupakan cerminan dari suatu nilai bangunan atau konstruksi atau biaya yang dibutuhkan untuk membangun 1 (satu) unit bangunan per satuan ukuran luas di suatu kabupaten/kota atau provinsi.

Untuk tujuan membandingkan harga konstruksi antar wilayah/daerah, dikenal dua metode penghitungan, yang pertama dengan pendekatan harga input dan yang kedua dengan pendekatan harga output. Pendekatan harga input yaitu dengan mencatat semua material penting yang digunakan, digabung dengan upah dan sewa peralatan sesuai dengan bobotnya masing-masing. Kelemahan metode ini bahwa kegiatan konstruksi dianggap mempunyai produktivitas yang sama dan tidak mempertimbangkan overhead cost. Disisi lain, pendekatan output dilakukan dengan cara menanyakan harga konstruksi yang sudah jadi. Namun, terdapat kelemahan pada pendekatan ini yaitu dalam harga bangunan sudah termasuk biaya manajemen dan keuntungan kontraktor yang bervariasi antar daerah dan antar proyek sehingga kurang sesuai untuk tujuan membandingkan kemahalan konstruksi antar wilayah. Dengan pertimbangan ini, disepakati penghitungan IKK menggunakan pendekatan harga input.

Dalam penghitungan IKK diperlukan data/komponen penunjang yaitu paket komoditas, diagram timbang, dan data harga jenis bahan bangunan yang menjadi paket komoditas penghitungan IKK. Selain itu, ditetapkan pula suatu kabupaten/kota sebagai acuan dalam penghitungan indeksnya.

Penentuan kota acuan dalam penghitungan IKK dilakukan dengan menentukan salah satu kabupaten/kota yang memiliki nilai IKK mendekati angka rata-rata seluruh kabupaten/ kota se-Indonesia. Pertimbangan penggunaan salah satu ibukota provinsi sebagai acuan dalam menghitung IKK diduga untuk memberikan fleksibilitas dalam penghitungan IKK apabila ada penambahan jumlah kabupaten/kota yang akan dihitung IKK-nya. Pada tahun 2013 sampai 2014 digunakan Kota Samarinda sebagai kota acuan. Tahun 2015 hingga 2017 digunakan Kota

Surabaya sebagai kota acuan. Tahun 2018-2020 digunakan Kota Semarang sebagai acuan, sedangkan sejak tahun 2021 sampai 2023 digunakan Kota Makassar sebagai kota acuan

2.2 Paket Komoditas IKK

Pengumpulan data harga di sektor konstruksi menggunakan pendekatan *Basket of Construction Components* (BOCC). Pendekatan ini digunakan dalam *International Comparison Programs* (ICP) tahun 2005. Metode pendekatan ini didesain untuk tujuan perbandingan antar wilayah. Dalam metode BOCC, data harga yang dikumpulkan terdiri dari komponen konstruksi utama dan input dasar yang umum dalam suatu wilayah. Komponen konstruksi merupakan output fisik konstruksi yang diproduksi sebagai tahap intermediate dalam proyek konstruksi. Elemen kunci dalam proses pendekatan ini yaitu semua harga yang diestimasi berhubungan dengan komponen yang dipasang, termasuk biaya material, tenaga kerja, dan peralatan dengan tujuan memberikan perbandingan harga konstruksi antar wilayah yang lebih sederhana dan biaya yang murah serta memungkinkan menggunakan metode *Bill of Quantity* (BOQ). Mengacu pada pendekatan BOCC, paket komoditas IKK didefinisikan sebagai suatu keranjang atau paket yang terdiri dari sejumlah bahan bangunan atau konstruksi yang dominan digunakan untuk membangun satu unit bangunan atau konstruksi. IKK dihitung menurut jenis kelompok barang/komoditas yang terdiri dari 5 (lima) jenis kelompok bangunan. Pengelompokan jenis bangunan yang dimaksud mengacu pada Klasifikasi Lapangan Usaha Indonesia (KLUI) yang terdiri dari 5 (lima) kelompok jenis bangunan yaitu bangunan tempat tinggal dan bukan tempat tinggal; prasarana pekerjaan umum untuk pertanian; jalan, jembatan, dan pelabuhan; bangunan dan instalasi listrik, gas, air minum, dan komunikasi; serta bangunan lainnya. Berikut klasifikasi dari masing masing jenis bangunan tersebut.

- a. Bangunan tempat tinggal dan bukan tempat tinggal:
 1. Konstruksi gedung tempat tinggal, meliputi: rumah yang dibangun sendiri, real estate, rumah susun, dan perumahan dinas.
 2. Konstruksi gedung bukan tempat tinggal, meliputi: konstruksi gedung perkantoran, industri, kesehatan, pendidikan, tempat hiburan, tempat ibadah, terminal/stasiun, dan bangunan monumental.
- b. Bangunan pekerjaan umum untuk pertanian:

1. Bangunan pengairan, meliputi: pembangunan waduk (reservoir), bendung (weir), embung, jaringan irigasi, pintu air, sipon dan drainase irigasi, talang, check dam, tanggul pengendali banjir, tanggul laut, krib, dan waduk
 2. Bangunan proses tempat hasil pertanian, meliputi: bangunan penggilingan dan bangunan pengeringan.
- c. Bangunan pekerjaan umum untuk jalan, jembatan dan pelabuhan:
1. Bangunan jalan, jembatan, dan landasan, meliputi: pembangunan jalan, jembatan, landasan pesawat terbang, pagar/tembok, drainase jalan, marka jalan, dan rambu rambu lalu lintas.
 2. Bangunan jalan dan jembatan kereta, meliputi: pembangunan jalan dan jembatan keret
 3. Bangunan dermaga, meliputi: pembangunan, pemeliharaan, dan perbaikan dermaga/ pelabuhan, sarana pelabuhan, dan penahan gelombang.
- d. Bangunan untuk instalasi listrik, gas, air minum dan komunikasi: 1.
1. Bangunan elektrikal, meliputi: pembangkit tenaga listrik, transmisi, dan transmisi tegangan tinggi.
 2. Konstruksi telekomunikasi udara, meliputi: konstruksi bangunan telekomunikasi dan navigasi udara, bangunan pemancar/penerima radar, dan bangunan antena.
 3. Konstruksi sinyal dan telekomunikasi kereta api, meliputi: pembangunan konstruksi sinyal dan telekomunikasi kereta api.
 4. Konstruksi sentral telekomunikasi, meliputi: bangunan sentral telefon/telegraf, konstruksi bangunan menara pemancar/ penerima radar microwave, dan bangunan stasiun bumi kecil/stasiun satelit.
 5. Instalasi air, meliputi: instalasi air bersih dan air limbah dan saluran drainase pada gedung.
 6. Instalasi listrik, meliputi: pemasangan instalasi jaringan listrik tegangan lemah dan pemasangan instalasi jaringan listrik tegangan kuat.
 7. Instalasi gas, meliputi: pemasangan instalasi gas pada gedung tempat tinggal dan pemasangan instalasi gas pada gedung bukan tempat tinggal.
 8. Instalasi listrik jalan, meliputi: instalasi listrik jalan raya, instalasi listrik jalan kereta api, dan instalasi listrik lapangan udara.
 9. Instalasi jaringan pipa, meliputi: jaringan pipa gas, jaringan air, dan jaringan minyak.

10. Bangunan lainnya, meliputi: bangunan sipil, pembangunan lapangan olahraga, lapangan parkir, dan sarana lingkungan pemukiman.

2.3 Diagram Timbang IKK

Diagram timbang yang digunakan dalam penghitungan IKK tahun 2023 terdiri dari diagram timbang kelompok jenis bangunan dan diagram timbang IKK umum. IKK tahun 2023 menggunakan penimbang updating *Bill of Quantity* (BoQ) sampai tahun 2022. BoQ ini dikumpulkan dari masing– masing kabupaten/kota agar setiap kabupaten/kota memiliki penimbang yang sesuai dengan karakteristik pembangunan di wilayahnya masing– masing.

2.4 Dana Alokasi Umum

Menurut Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan sejumlah dana yang dialokasikan kepada setiap Daerah Otonom (Provinsi/Kabupaten/Kota) di Indonesia setiap tahunnya sebagai dana pembangunan. DAU merupakan salah satu komponen belanja pada APBN, dan menjadi salah satu komponen pendapatan pada APBD. Tujuan DAU salah satunya sebagai pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah Otonom dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana Alokasi Umum terdiri dari:

1. Dana Alokasi Umum untuk Daerah Provinsi
2. Dana Alokasi Umum untuk Daerah Kabupaten/Kota.

Persentase Pembagian DAU antara Provinsi dan Kabupaten/Kota sebesar 10 persen dari total DAU Nasional dialokasikan kepada Provinsi dan 90 persen dari total DAU Nasional dialokasikan kepada Kabupaten/Kota. Perhitungan besaran DAU secara nasional yaitu minimal sebesar 26 persen dari Pendapatan Dalam Negeri Netto (PDN Netto). Setiap Provinsi/ Kabupaten/Kota menerima DAU dengan besaran yang tidak sama. Daerah dimungkinkan mendapatkan DAU lebih besar atau lebih kecil atau sama dengan DAU tahun sebelumnya. Bahkan di beberapa daerah yang memiliki Kapasitas Fiskal sangat besar dimungkinkan untuk tidak mendapat DAU (DAU = 0).

2.5 Formula Penghitungan Indeks Kemahalan Konstruksi

Penghitungan IKK 2023 dilakukan melalui beberapa tahapan. Tahap pertama adalah penghitungan nilai komponen konstruksi masing–masing sistem dari suatu bangunan untuk

setiap kabupaten/kota. Nilai komponen tersebut dihitung menggunakan nilai tertimbang dengan rumus sebagai berikut

$$NK_j = \sum_{k=1}^n p_k \cdot q_k$$

Keterangan:

NK_j = Nilai Komponen ke-j

p_k = Harga material/upah/sewa alat ke-k

q_k = Kuantitas/volume material/upah/sewa ke-k

n = Jumlah material/upah/sewa dalam komponen ke-j

Tahap penghitungan kedua adalah menghitung *Purchasing Power Parity* (PPP) sistem dengan menggunakan metode regresi *Country Product Dummy* (CPD). Model regresi CPD adalah sebagai berikut: Tahap penghitungan kedua adalah menghitung *Purchasing Power Parity* (PPP) sistem dengan menggunakan metode regresi *Country Product Dummy* (CPD). Model regresi CPD adalah sebagai berikut

$$\ln NK_j = \alpha_i C_i + \beta_j P_j + \varepsilon$$

NK_j : Nilai komponen ke-j

C_i : dummy kabupaten/kota ke-i

P_j : dummy komponen ke-j dalam suatu sistem dan bangunan

α_i dan β_j : koefisien regresi

PPP (*Purchasing Power Parity*)_{sistem_i} : $\exp(\alpha_i)$

Tahap penghitungan ketiga adalah menghitung PPP bangunan dengan menggunakan metode rata-rata geometrik tertimbang (bobot sistem) dengan rumus sebagai berikut:

$$PPP_{bangunan_i} = \left(\prod_{i=1}^n PPP_{sistem_i} \right)^{w2i}$$

n = jumlah sistem dalam suatu bangunan

Tahap penghitungan terakhir adalah menghitung IKK kabupaten/kota dengan menggunakan metode rata-rata geometrik tertimbang (bobot APBD) dengan rumus sebagai berikut:

$$PPP_{proyek_i} = \left(\prod_{i=1}^n PPP_{bangunan_i} \right)^{\frac{1}{n}}$$

n = jumlah system dalam suatu bangunan

Dalam menghitung PPP sistem diperlukan suatu kota acuan sebagai pembanding. Kota acuan ditetapkan berdasarkan beberapa pertimbangan, misalkan pusat distribusi barang, harga cenderung stabil, variasi harga cenderung berada di sekitar harga rata-rata nasional, dan sebagainya.

$$C_i = \text{dummy kota acuan} = 0$$

Tahap penghitungan terakhir adalah menghitung IKK kabupaten/kota dengan menggunakan metode rata-rata geometrik tertimbang (bobot APBD) dengan rumus sebagai berikut:

$$IKK_{kab/kota} = \left(\left(\prod_{i=1}^n PPP_{proyek_i} \right)^{w1i} \right) \cdot 100$$

Keterangan :

n = jumlah proyek dalam suatu kabupaten/kota

BAB III ULASAN RINGKAS

3.1 Gambaran Umum Provinsi Sulawesi Selatan

Provinsi Sulawesi Selatan merupakan salah satu provinsi yang terletak di ujung selatan pulau Sulawesi. Secara Astronomis, Provinsi Sulawesi Selatan terletak pada posisi titik koordinat $0^{\circ}12' - 8^{\circ}$ Lintang Selatan dan $116^{\circ}48' - 122^{\circ}36'$ Bujur Timur dan dilalui oleh garis ekuator atau garis khatulistiwa yang terletak pada garis lintang 00. Secara geografis provinsi Sulawesi Selatan berbatasan dengan Sulawesi Tengah dan Sulawesi Barat dibagian utara, Teluk Bone dan Sulawesi Tenggara dibagian timur, Selat Makassar di bagian barat dan Laut Flores di Sulawesi Selatan. Berdasarkan letak geografisnya, Sulawesi Selatan mempunyai dua kabupaten kepulauan, yaitu Kepulauan Selayar dan Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep). Provinsi ini memiliki luas wilayah sebesar 46.717,48 km persegi. Secara administrasi, provinsi Sulawesi Selatan dibagi menjadi 21 kabupaten dan 3 kota. Untuk rincian kabupaten/kota dapat dilihat pada tabel 1 ini.

Tabel 1. Luas Wilayah Kabupaten/Kota Sulawesi Selatan

No	Nama Kabupaten/Kota	Luas Total Area (Km ² /sq.km)	Persentase (%)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Kepulauan Selayar	1357,03	2,90
2	Bulukumba	1284,63	2,75
3	Bantaeng	395,83	0,85
4	Jeneponto	706,52	1,51
5	Takalar	566,61	1,21
6	Gowa	1883,32	4,03
7	Sinjai	798,96	1,71
8	Maros	1619,12	3,47
9	Pangkajene Kepulauan	1132,08	2,42
10	Barru	1174,71	2,51
11	Bone	4559,00	9,76

No	Nama Kabupaten/Kota	Luas Total Area (Km ² /sq.km)	Persentase (%)
(1)	(2)	(3)	(4)
12	Soppeng	1557,00	3,33
13	Wajo	2504,06	5,36
14	Sidenreng Rappang	1883,23	4,03
15	Pinrang	1961,67	4,20
16	Enrekang	1784,93	3,82
17	Luwu	3343,97	7,16
18	Tana Toraja	1990,22	4,26
19	Luwu Utara	7502,58	16,06
20	Luwu Timur	6944,88	14,87
21	Toraja Utara	1215,55	2,60
22	Makassar	199,36	0,43
23	Parepare	99,33	0,21
24	Palopo	252,99	0,54

Berdasarkan tabel 1, Parepare merupakan kota yang memiliki luas daerah terkecil di Sulawesi Selatan dengan luas daerah 99,33 Km²/sq.km atau 0,21 persen dari luas provinsi Sulawesi Selatan. Untuk yang tiga daerah terluas adalah kabupaten Luwu Utara dengan luas daerah 7.502,58 Km²/sq.km atau 16,06 persen dari luas provinsi Sulawesi Selatan, kabupaten Luwu Timur dengan luas daerah 6944,88 Km²/sq.km atau 14,87 persen dari luas provinsi Sulawesi Selatan serta kabupaten Bone dengan luas daerah 4599 Km²/sq.km atau 9,76 persen dari luas provinsi Sulawesi Selatan.

Bila dilihat berdasarkan tinggi wilayah maka kabupaten yang memiliki wilayah tertinggi adalah kabupaten Luwu dengan tinggi 3469 meter dari permukaan laut. Untuk dataran paling rendah dimiliki oleh kota Makassar. Untuk wilayah yang tidak berbatasan dengan laut di Sulawesi Selatan adalah kabupaten Soppeng, Sidenreng Rappang, Enrekang, Tana Toraja dan Toraja Utara.

3.2 Kondisi Transportasi Provinsi Sulawesi Selatan

Pembangunan dan peningkatan fasilitas transportasi seperti jalan dan jembatan diperlukan demi memudahkan proses mobilisasi penduduk antar daerah dan menunjang kelancaran distribusi barang dan jasa, utamanya untuk daerah-daerah sulit terjangkau. Jalan raya merupakan salah satu prasarana penting dalam transportasi darat yaitu sebagai penghubung antara sentra-sentra produksi dengan daerah pemasaran dalam rangka meningkatkan perekonomian suatu wilayah. Terkait dengan besaran harga barang dan jasa pada bidang konstruksi, selain ketersediaan barang/jasa (supply), hal ini dipengaruhi juga kelancaran distribusi barang/jasa (konstruksi) ke suatu wilayah. Dengan demikian kondisi jalan menjadi salah satu syarat dalam pendistribusian barang ke suatu wilayah yang pada akhirnya berpengaruh terhadap pembentukan harga barang/jasa konstruksi tersebut.

Data pada akhir tahun 2023 menunjukkan Panjang jalan di Sulawesi Selatan tercatat sepanjang 2.009,35 Km. Dimana sebanyak yang berkriteria baik sepanjang 783,31 Km, sedang sepanjang 623,43 Km dan berkriteria rusak 270,90 Km. Jika dilihat berdasarkan jenis permukaan jalan maka sebanyak 1263,48 Km dalam kondisi beraspal, 486,63 tidak di aspal dan jenis permukaan lainnya sebesar 259,24 Km.

Selain kondisi jalan, pembentukan harga barang/jasa konstruksi juga diduga dipengaruhi oleh jarak kabupaten/kota sebagai produsen /sumber barang/jasa menuju setiap lokasi pembangunan konstruksi di Sulawesi Selatan. Jarak antar kabupaten/kota terjauh di provinsi Sulawesi Selatan adalah dari Kabupaten Kepulauan Selayar menuju Kabupaten Luwu Timur dengan jarak 704 Km. Moda transportasi laut juga menjadi sarana pendukung transportasi provinsi Sulawesi Selatan dengan provinsi-provinsi lainnya di Indonesia. Akses barang masuk dari luar Sulawesi Selatan yang masih dalam cakupan dalam negeri berada di setiap kabupaten / kota yang ada di Sulawesi Selatan.

3.3 Dana Alokasi Umum (DAU) Provinsi Sulawesi Selatan

Besaran DAU bagi tiap daerah memiliki peran penting sebagai salah satu sumber penerimaan yang akan digunakan untuk membiayai pembangunan yang dilaksanakan di daerahnya. Setiap Provinsi/Kabupaten/Kota menerima DAU dengan besaran yang tidak sama, serta dimungkinkan mendapatkan DAU lebih besar atau lebih kecil atau sama dengan DAU tahun sebelumnya. Besaran DAU per Kabupaten/Kota se-Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2022 diasjikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Alokasi DAU Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021

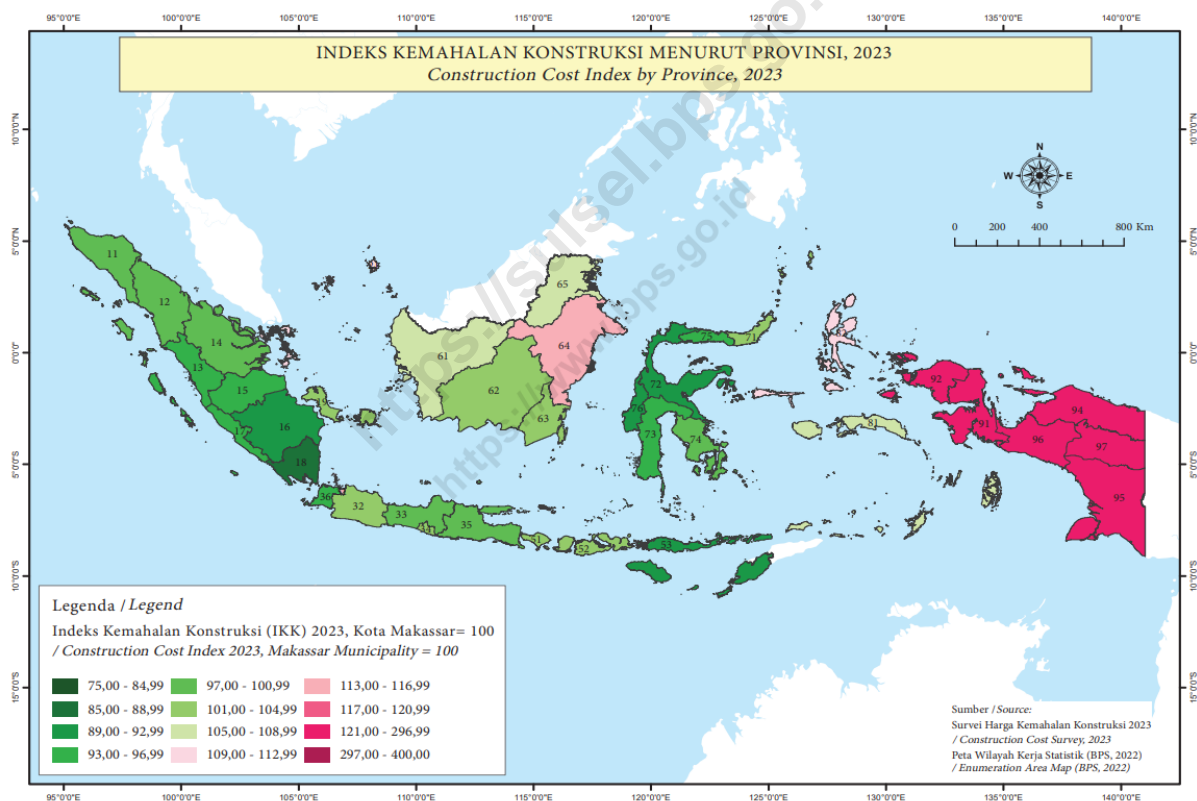
No	Kabupaten/Kota	Alokasi (Milyar rupiah)
(1)	(2)	(3)
1	Kepulauan Selayar	560.60
2	Bulukumba	659.91
3	Bantaeng	468.05
4	Jeneponto	604.87
5	Takalar	564.93
6	Gowa	795.80
7	Sinjai	542.29
8	Maros	660.03
9	Pangkajene Kepulauan	702.24
10	Barru	482.68
11	Bone	996.36
12	Soppeng	579.19
13	Wajo	668.13
14	Sidenreng Rappang	575.55
15	Pinrang	661.44
16	Enrekang	496.70
17	Luwu	647.62
18	Tana Toraja	537.32
19	Luwu Utara	617.42
20	Luwu Timur	503.13
21	Toraja Utara	498.50
22	Makassar	1.257.67
23	Parepare	429.88
24	Palopo	487.72
25	Provinsi Sulawesi Selatan	2.340.04
Total		17.338.05

Sumber : <https://djpk.kemenkeu.go.id/>

Kabupaten yang tercatat memperoleh DAU paling besar di Provinsi Sulawesi Selatan adalah Makassar sebesar 1257,67 miliar rupiah, kemudian disusul Kabupaten Bone sebesar 996,36 miliar rupiah. Sementara itu, kabupaten yang tercatat memperoleh DAU paling rendah adalah Kota Parepare dengan DAU sebesar 429,88 miliar rupiah.

3.4 Indeks Kemahalan Konstruksi Provinsi Sulawesi Selatan

IKK merupakan indeks spasial yang digunakan untuk membandingkan tingkat harga / kemahalan bahan bangunan/jasa konstruksi di suatu daerah dibandingkan kota acuan. Semakin besar IKK menunjukkan semakin mahal harga bahan bangunan/konstruksi di wilayah tersebut dibandingkan dengan kota acuan. Harga bahan bangunan atau konstruksi, harga sewa alat berat, dan jasa konstruksi (upah tukang) di suatu daerah diduga dipengaruhi oleh letak geografis dan kemanapun daerah tersebut dalam menyediakan bahan bangunan secara mandiri.

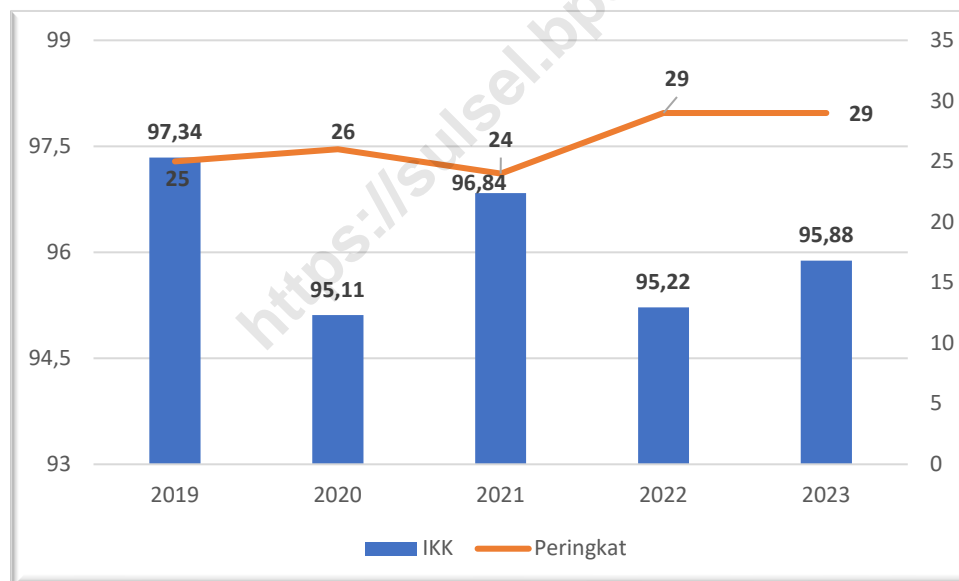


Gambar 1. Peta Tematik Indeks Kemahalan Konstruksi Menurut Provinsi di Indonesia Tahun 2023

Gambar tersebut menunjukkan nilai IKK tahun 2023 menurut provinsi Seluruh Indonesia. Seperti terlihat pada gambar bahwa nilai IKK Provinsi Sulawesi Selatan sebesar 95,88. Angka ini menunjukkan bahwa tingkat kemahalan harga barang / jasa konstruksi secara

umum di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan lebih murah 4,12 persen dibandingkan dengan kota acuan Makassar yang merupakan ibukota provinsi Sulawesi Selatan. Jika dilihat besaran IKK-nya rata-rata IKK di provinsi Sulawesi Selatan relatif rendah dibandingkan nilai IKK pada provinsi-provinsi di Pulau Sulawesi. Hal ini diduga provinsi-provinsi di Pulau Sulawesi yang memiliki nilai IKK lebih tinggi dari Sulawesi Selatan sebagian besar barang konstruksinya didatangkan dari provinsi Sulawesi Selatan terutama barang hasil industri/pabrik.

Pada tahun 2023, IKK tertinggi tercatat di Provinsi Papua Pegunungan sebesar 251,25 dan terendah berada pada Provinsi Lampung dengan nilai IKK sebesar 88,65. Tidak hanya tahun 2023, namun selama lima tahun terakhir dari tahun 2018 – 2023, provinsi Papua selalu menduduki IKK tertinggi di antara semua provinsi yang ada di Indonesia. Hal ini menandakan bahwa harga alat dan bahan ataupun jasa terkait konstruksi di provinsi Papua paling mahal di Indonesia. Jika diurutkan dari nilai IKK tertinggi pada tahun 2023, provinsi Sulawesi Selatan menduduki urutan ke-29 dari 38 provinsi di Indonesia. Bila di antara provinsi yang berada di Pulau Sulawesi, Sulawesi Selatan menduduki posisi ke-4 dari 6 provinsi yang ada.



Gambar 2. Nilai dan Rangka Indeks Kemahalan Konstruksi Provinsi Sulawesi Selatan, 2019 - 2023

Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, besaran nilai dan ranking IKK Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2023 terhitung rendah. Hal ini mengisyaratkan perubahan harga barang/jasa konstruksi di Provinsi Sulawesi Selatan relatif lebih cepat dibandingkan besaran perubahan harga di kota acuan (kota Makassar). Karena merupakan indeks spasial, kenaikan atau penurunan nilai IKK tidak serta merta menunjukkan kenaikan atau penurunan harga

barang/ jasa konstruksi di wilayah tersebut. Kenaikan IKK antar tahun hanya menunjukkan kecepatan kenaikan harga barang/jasa konstruksi di suatu wilayah lebih tinggi dibandingkan kecepatan kenaikan harga barang / jasa konstruksi di kota acuan.

3.5 Indeks Kemahalan Konstruksi Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan

Selain menghitung IKK provinsi, BPS juga menghitung 514 IKK kabupaten / kota. Kabupaten/kota yang tercatat memiliki nilai IKK paling tinggi yakni Kabupaten Puncak sebesar 383,61 disusul kabupaten Intan Jaya sebesar 376,04 kemudian kabupaten Puncak Jaya sebesar 351,45. Ketiga kabupaten tersebut terletak di provinsi Papua. Nilai IKK terendah tercatat di Kabupaten Belu sebesar 81,39; kemudian disusul kabupaten Timor Tengah Utara sebesar 82,95; dan selanjutnya adalah kota Kupang. Ketiganya kabupaten/kota tersebut terletak di provinsi Nusa Tenggara Timur.

Provinsi Sulawesi Selatan terdiri dari 24 Kabupaten/Kota, nilai IKK tertinggi pada tahun 2022 tercatat di Kabupaten Luwu Timur yaitu sebesar 102,61, kemudian disusul Kabupaten Kepulauan Selayar sebesar 102,51 dan Kabupaten Luwu Utara sebesar 102,07. Sementara itu, IKK terendah tercatat di Kabupaten Barru sebesar 87,98. Selengkapnya tentang IKK Kabupaten/Kota se Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023 disajikan pada Tabel 3.

Tabel 3. Indeks Kemahalan Konstruksi Kabupaten / Kota di Provinsi Sulawesi Selatan 2022

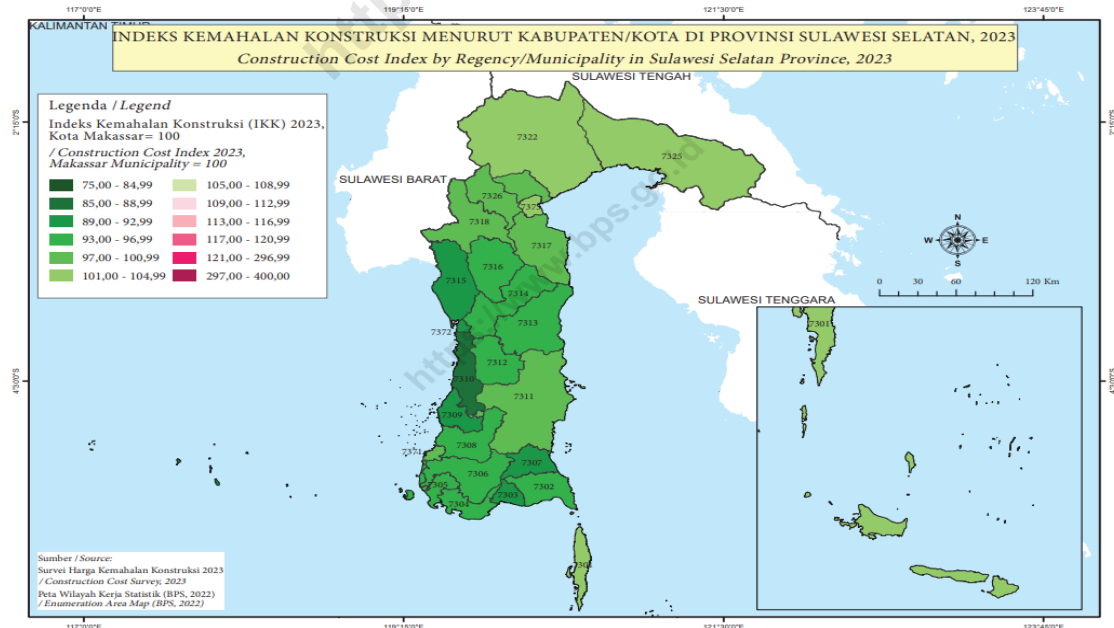
No	Kabupaten/Kota	IKK	Ranking	No	Kabupaten/Kota	IKK	Ranking
(1)	(2)	(3)	(4)	(1)	(2)	(3)	(4)
1	Kepulauan Selayar	102,51	2	13	Wajo	96,00	11
2	Bulukumba	93,06	17	14	Sidenreng Rappang	94,14	15
3	Bantaeng	91,43	21	15	Pinrang	91,00	22
4	Jeneponto	96,8	10	16	Enrekang	94,79	13
5	Takalar	93,04	18	17	Luwu	100,43	7
6	Gowa	95,1	12	18	Tana Toraja	100,65	5
7	Sinjai	91,86	20	19	Luwu Utara	102,07	3
8	Maros	93,64	16	20	Luwu Timur	102,61	1
9	Pangkajene Kepulauan	89,33	23	21	Toraja Utara	100,56	6
10	Barru	87,98	24	22	Makassar	100,00	8
11	Bone	98,84	9	23	Parepare	92,17	19

No	Kabupaten/Kota	IKK	Ranking
(1)	(2)	(3)	(4)
12	Soppeng	94,26	14

No	Kabupaten/Kota	IKK	Ranking
(1)	(2)	(3)	(4)
24	Palopo	101,29	4
Sulawesi Selatan		95,88	

Nilai IKK Kabupaten Luwu timur sebesar 102,61 sebesar menunjukkan tingkat kemahalan barang/jasa konstruksi di Kabupaten Luwu Timur 2,61 persen lebih mahal dari kota acuan (Kota Makassar). Dengan kata lain jika untuk membangun sebuah gedung di kota Makassar dibutuhkan biaya 100 miliar rupiah, maka gedung yang sama dibangun di kabupaten Luwu Timur akan memerlukan biaya sebesar 102,61 miliar rupiah.

Sementara itu, nilai IKK Kabupaten Barru sebesar 87,98 menunjukkan bahwa jika untuk membangun sebuah gedung di Kota Makassar dibutuhkan biaya 100 miliar rupiah, maka gedung yang sama dibangun di Kabupaten Barru akan memerlukan biaya sebesar 87,98 miliar rupiah. IKK Kabupaten Barru yang paling rendah di Provinsi Sulawesi Selatan. Diduga karena akses ke transportasi ke ibukota provinsi yang lebih singkat dan mudah, harga barang atau alat konstruksi dari pihak produsen yang lebih murah serta upah untuk membayar tenaga kerja sektor konstruksi di Kabupaten Barru yang lebih murah dibandingkan dengan kabupaten/ kota lainnya yang ada di Sulawesi Selatan



Gambar 3. Peta Tematik Indeks Kemahalan Konstruksi Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Nilai IKK Provinsi di Indonesia Tahun 2019 (Kota Semarang =100)

Kode	Provinsi	IKK	Peringkat
(1)	(2)	(3)	
1100	Aceh	98,68	23
1200	Sumatera Utara	102,79	15
1300	Sumatera Barat	93,72	31
1400	Riau	94,92	27
1500	Jambi	94,38	30
1600	Sumatera Selatan	94,50	29
1700	Bengkulu	94,74	28
1800	Lampung	88,84	34
1900	Kepulauan Bangka Belitung	101,27	18
2100	Kepulauan Riau	128,34	3
3100	DKI Jakarta	114,06	8
3200	Jawa Barat	103,03	14
3300	Jawa Tengah	99,93	20
3400	D.I. Yogyakarta	103,42	13
3500	Jawa Timur	103,68	12
3600	Banten	95,84	26
5100	Bali	119,10	6
5200	Nusa Tenggara Barat	98,76	22
5300	Nusa Tenggara Timur	99,03	21
6100	Kalimantan Barat	111,53	10
6200	Kalimantan Tengah	101,90	16
6300	Kalimantan Selatan	100,90	19
6400	Kalimantan Timur	114,37	7
6500	Kalimantan Utara	112,11	9
7100	Sulawesi Utara	108,32	11

Kode	Provinsi	IKK	Peringkat
(1)	(2)	(3)	
7200	Sulawesi Tengah	91,98	33
7300	Sulawesi Selatan	97,34	25
7400	Sulawesi Tenggara	101,45	17
7500	Gorontalo	97,45	24
7600	Sulawesi Barat	92,27	32
8100	Maluku	123,02	4
8200	Maluku Utara	119,11	5
9100	Papua Barat	132,67	2
9400	Papua	218,59	1

<https://sulsel.bps.go.id>

Lampiran 2. Nilai IKK Provinsi di Indonesia Tahun 2020 (Kota Semarang = 100)

Kode	Provinsi	IKK	Peringkat
(1)	(2)	(3)	
1100	Aceh	96,38	24
1200	Sumatera Utara	99,84	18
1300	Sumatera Barat	92,96	28
1400	Riau	95,72	25
1500	Jambi	90,35	32
1600	Sumatera Selatan	92,69	29
1700	Bengkulu	91,78	30
1800	Lampung	88,67	34
1900	Kepulauan Bangka Belitung	101,90	15
2100	Kepulauan Riau	121,50	4
3100	DKI Jakarta	116,84	6
3200	Jawa Barat	103,93	12
3300	Jawa Tengah	97,31	22
3400	D.I. Yogyakarta	102,29	14
3500	Jawa Timur	102,44	13
3600	Banten	97,05	23
5100	Bali	115,04	7
5200	Nusa Tenggara Barat	99,13	20
5300	Nusa Tenggara Timur	97,95	21
6100	Kalimantan Barat	110,92	8
6200	Kalimantan Tengah	99,55	19
6300	Kalimantan Selatan	100,32	17
6400	Kalimantan Timur	109,69	10
6500	Kalimantan Utara	109,90	9
7100	Sulawesi Utara	104,11	11
7200	Sulawesi Tengah	90,74	31
7300	Sulawesi Selatan	95,11	26
7400	Sulawesi Tenggara	101,09	16
7500	Gorontalo	94,12	27

Kode	Provinsi	IKK	Peringkat
(1)	(2)	(3)	
7600	Sulawesi Barat	89,48	33
8100	Maluku	124,38	3
8200	Maluku Utara	120,52	5
9100	Papua Barat	129,66	2
9400	Papua	208,90	1

<https://sulsel.bps.go.id>

Lampiran 3. Nilai IKK Provinsi di Indonesia Tahun 2021 (Kota Makassar = 100)

Kode	Provinsi	IKK	Peringkat
(1)	(2)	(3)	
1100	Aceh	99,03	21
1200	Sumatera Utara	101,63	14
1300	Sumatera Barat	94,77	27
1400	Riau	94,85	26
1500	Jambi	92,76	30
1600	Sumatera Selatan	91,58	32
1700	Bengkulu	94,42	28
1800	Lampung	92,57	31
1900	Kepulauan Bangka Belitung	101,21	16
2100	Kepulauan Riau	116,80	5
3100	DKI Jakarta	121,42	4
3200	Jawa Barat	102,60	12
3300	Jawa Tengah	97,65	22
3400	D.I. Yogyakarta	100,31	18
3500	Jawa Timur	100,80	17
3600	Banten	97,64	23
5100	Bali	103,17	11
5200	Nusa Tenggara Barat	101,93	13
5300	Nusa Tenggara Timur	93,58	29
6100	Kalimantan Barat	111,45	7
6200	Kalimantan Tengah	101,47	15
6300	Kalimantan Selatan	99,25	20
6400	Kalimantan Timur	109,81	8
6500	Kalimantan Utara	106,00	9
7100	Sulawesi Utara	104,43	10
7200	Sulawesi Tengah	90,50	34
7300	Sulawesi Selatan	96,84	24
7400	Sulawesi Tenggara	99,38	19
7500	Gorontalo	95,07	25

Kode	Provinsi	IKK	Peringkat
(1)	(2)	(3)	
7600	Sulawesi Barat	90,72	33
8100	Maluku	124,61	3
8200	Maluku Utara	112,31	6
9100	Papua Barat	130,59	2
9400	Papua	207,11	1

<https://sulsel.bps.go.id>

Lampiran 4. Nilai IKK Provinsi di Indonesia Tahun 2022 (Kota Makassar = 100)

Kode	Provinsi	IKK	Peringkat
(1)	(2)	(3)	
1100	Aceh	100,59	20
1200	Sumatera Utara	103,40	15
1300	Sumatera Barat	97,66	25
1400	Riau	99,21	22
1500	Jambi	96,84	26
1600	Sumatera Selatan	92,04	32
1700	Bengkulu	95,65	27
1800	Lampung	90,46	33
1900	Kepulauan Bangka Belitung	102,78	16
2100	Kepulauan Riau	115,97	4
3100	DKI Jakarta	121,48	3
3200	Jawa Barat	105,97	9
3300	Jawa Tengah	100,63	19
3400	D.I. Yogyakarta	102,37	17
3500	Jawa Timur	100,02	21
3600	Banten	97,72	24
5100	Bali	104,74	11
5200	Nusa Tenggara Barat	104,44	14
5300	Nusa Tenggara Timur	93,69	30
6100	Kalimantan Barat	109,37	7
6200	Kalimantan Tengah	104,77	10
6300	Kalimantan Selatan	102,26	18
6400	Kalimantan Timur	115,65	5
6500	Kalimantan Utara	104,69	13
7100	Sulawesi Utara	104,74	12
7200	Sulawesi Tengah	92,50	31
7300	Sulawesi Selatan	95,22	29
7400	Sulawesi Tenggara	98,02	23
7500	Gorontalo	95,28	28

Kode	Provinsi	IKK	Peringkat
(1)	(2)	(3)	
7600	Sulawesi Barat	87,44	34
8100	Maluku	107,97	8
8200	Maluku Utara	110,60	6
9100	Papua Barat	124,82	2
9400	Papua	192,57	1

<https://sulsel.bps.go.id>

Lampiran 5. Nilai IKK Provinsi di Indonesia Tahun 2023 (Kota Makassar = 100)

Kode	Provinsi	IKK	Peringkat
(1)	(2)	(3)	
1100	Aceh	97,38	27
1200	Sumatera Utara	98,81	24
1300	Sumatera Barat	94,15	31
1400	Riau	99,06	23
1500	Jambi	93,55	32
1600	Sumatera Selatan	91,39	37
1700	Bengkulu	93,27	33
1800	Lampung	88,65	38
1900	Kepulauan Bangka Belitung	103,94	17
2100	Kepulauan Riau	111,32	10
3100	DKI Jakarta	116,73	7
3200	Jawa Barat	104,08	16
3300	Jawa Tengah	100,19	22
3400	D.I. Yogyakarta	104,46	15
3500	Jawa Timur	98,47	25
3600	Banten	95,74	30
5100	Bali	103,4	18
5200	Nusa Tenggara Barat	102,01	20
5300	Nusa Tenggara Timur	92,44	34
6100	Kalimantan Barat	107,44	12
6200	Kalimantan Tengah	104,89	14
6300	Kalimantan Selatan	103,25	19
6400	Kalimantan Timur	115,58	8
6500	Kalimantan Utara	105,21	13
7100	Sulawesi Utara	101,62	21
7200	Sulawesi Tengah	91,96	35
7300	Sulawesi Selatan	95,88	29
7400	Sulawesi Tenggara	98,20	26
7500	Gorontalo	95,99	28

Kode	Provinsi	IKK	Peringkat
(1)	(2)	(3)	
7600	Sulawesi Barat	91,94	36
8100	Maluku	108,12	11
8200	Maluku Utara	112,7	9
9100	Papua Barat	124,26	5
9200	Papua Barat Daya	121,87	6
9400	Papua	135,56	4
9500	Papua Selatan	138,42	3
9600	Papua Tengah	215,86	2
9700	Papua Pegunungan	251,25	1

<https://sulsel.bps.go.id>

Lampiran 6. Nilai IKK Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019

Kode	Kabupaten/Kota	IKK	Peringkat
(1)	(2)	(3)	(4)
7301	Kepulauan Selayar	112,16	1
7302	Bulukumba	89,03	22
7303	Bantaeng	90,84	21
7304	Jeneponto	97,38	12
7305	Takalar	92,71	19
7306	Gowa	88,13	24
7307	Sinjai	94,36	18
7308	Maros	88,75	23
7309	Pangkajene Kepulauan	95,65	15
7310	Barru	97,36	13
7311	Bone	97,60	10
7312	Soppeng	92,25	20
7313	Wajo	98,74	7
7314	Sidenreng Rappang	95,11	16
7315	Pinrang	98,31	9
7316	Enrekang	103,63	5
7317	Luwu	106,19	3
7318	Tana Toraja	105,85	4
7322	Luwu Utara	98,73	8
7325	Luwu Timur	108,49	2
7326	Toraja Utara	97,45	11
7371	Makassar	97,15	14
7372	Parepare	94,44	17
7373	Palopo	100,25	6

Lampiran 7. Nilai IKK Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020

Kode	Kabupaten/Kota	IKK	Peringkat
(1)	(2)	(3)	(4)
7301	Kepulauan Selayar	108,84	1
7302	Bulukumba	91,69	18
7303	Bantaeng	86,04	24
7304	Jeneponto	96,44	9
7305	Takalar	88,36	22
7306	Gowa	88,61	21
7307	Sinjai	87,77	23
7308	Maros	91,25	19
7309	Pangkajene Kepulauan	92,58	15
7310	Barru	92,23	16
7311	Bone	94,23	12
7312	Soppeng	92,11	17
7313	Wajo	98,16	8
7314	Sidenreng Rappang	89,87	20
7315	Pinrang	95,10	11
7316	Enrekang	102,31	4
7317	Luwu	102,12	5
7318	Tana Toraja	102,65	3
7322	Luwu Utara	93,63	14
7325	Luwu Timur	104,71	2
7326	Toraja Utara	98,75	7
7371	Makassar	95,72	10
7372	Parepare	93,76	13
7373	Palopo	99,75	6

Lampiran 8. Nilai IKK Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021

Kode	Kabupaten/Kota	IKK	Peringkat
(1)	(2)	(3)	(4)
7301	Kepulauan Selayar	104,21	3
7302	Bulukumba	93,87	16
7303	Bantaeng	91,40	19
7304	Jeneponto	96,49	12
7305	Takalar	89,07	23
7306	Gowa	93,12	17
7307	Sinjai	88,71	24
7308	Maros	90,76	21
7309	Pangkajene Kepulauan	93,06	18
7310	Barru	89,74	22
7311	Bone	95,20	14
7312	Soppeng	94,44	15
7313	Wajo	101,61	6
7314	Sidenreng Rappang	95,38	13
7315	Pinrang	90,83	20
7316	Enrekang	100,79	8
7317	Luwu	101,10	7
7318	Tana Toraja	104,99	2
7322	Luwu Utara	100,53	9
7325	Luwu Timur	106,80	1
7326	Toraja Utara	104,19	4
7371	Makassar	100,00	10
7372	Parepare	98,92	11
7373	Palopo	102,74	5

Lampiran 9. Nilai IKK Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022

Kode	Kabupaten/Kota	IKK	Peringkat
(1)	(2)	(3)	(4)
7301	Kepulauan Selayar	103,82	3
7302	Bulukumba	90,65	18
7303	Bantaeng	90,16	19
7304	Jeneponto	93,71	13
7305	Takalar	88,36	23
7306	Gowa	92,89	14
7307	Sinjai	89,14	21
7308	Maros	90,02	20
7309	Pangkajene Kepulauan	88,90	22
7310	Barru	87,44	24
7311	Bone	96,96	9
7312	Soppeng	91,71	15
7313	Wajo	97,57	8
7314	Sidenreng Rappang	90,91	16
7315	Pinrang	90,78	17
7316	Enrekang	95,95	11
7317	Luwu	96,52	10
7318	Tana Toraja	105,71	2
7322	Luwu Utara	100,51	6
7325	Luwu Timur	107,47	1
7326	Toraja Utara	102,66	4
7371	Makassar	100,00	7
7372	Parepare	95,69	12
7373	Palopo	101,93	5

Lampiran 10. Nilai IKK Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023

Kode	Kabupaten/Kota	IKK	Peringkat
(1)	(2)	(3)	(4)
7301	Kepulauan Selayar	102,51	2
7302	Bulukumba	93,06	17
7303	Bantaeng	91,43	21
7304	Jeneponto	96,80	10
7305	Takalar	93,04	18
7306	Gowa	95,10	12
7307	Sinjai	91,86	20
7308	Maros	93,64	16
7309	Pangkajene Kepulauan	89,33	23
7310	Barru	87,98	24
7311	Bone	98,84	9
7312	Soppeng	94,26	14
7313	Wajo	96,00	11
7314	Sidenreng Rappang	94,14	15
7315	Pinrang	91,00	22
7316	Enrekang	94,79	13
7317	Luwu	100,43	7
7318	Tana Toraja	100,65	5
7322	Luwu Utara	102,07	3
7325	Luwu Timur	102,61	1
7326	Toraja Utara	100,56	6
7371	Makassar	100,00	8
7372	Parepare	92,17	19
7373	Palopo	101,29	4

DATA

MENCERDASKAN BANGSA



***BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI SULAWESI SELATAN***

Jl. Haji Bau No.6 Makassar 90125 Sulawesi Selatan

Telp (0411) 854838, Faks (0411) 851225

Homepage : <http://sulsel.bps.go.id>

Email : pst7300@bps.go.id